

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Menurut UU RI Nomor 12 Tahun 2012, Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia, lebih lanjut menurut UU RI Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan tinggi memiliki fungsi sebagai berikut (Menteri Hukum dan HAM, 2012): (1) Mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, dan (3) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Perkembangan dalam dunia pendidikan ditandai dengan banyak bermunculannya Lembaga Pendidikan Tinggi atau Universitas. Terjadi persaingan antar lembaga-lembaga tersebut merebut pasar pendidikan. Menghadapi persaingan tersebut, universitas dituntut mampu untuk menciptakan nilai universitas dan mampu untuk mengelola faktor-faktor produksi yang ada secara efektif dan efisien. Selain dari pada itu, universitas juga dituntut untuk meningkatkan kinerja usahanya, sehingga universitas akan dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Untuk menjalankan aktivitas operasional pada dasarnya universitas membutuhkan modal kerja. Modal kerja ini digunakan untuk membiayai operasional dan juga sebagai sumber dana untuk mencegah hal – hal yang tidak diharapkan.

Modal kerja merupakan masalah pokok dan topik penting yang sering kali dihadapi oleh perusahaan, karena hampir semua perhatian untuk mengelola modal

kerja dan aktiva lancar yang merupakan bagian yang cukup besar dari aktiva (David, 2020). Sebagai sebuah lembaga yang bersifat nirlaba, pemasukan utama dari universitas berasal dari uang kuliah mahasiswa. Uang kuliah tersebut adalah hak yang diterima universitas atas jasa pengajaran yang telah dilakukan pada periode tertentu. Namun peraturan pembayaran uang kuliah yang kurang tepat dapat menimbulkan risiko operasional yang berdampak pada penerimaan uang kuliah mahasiswa,

Peraturan pembayaran uang kuliah, karakter mahasiswa dan besarnya tarif uang kuliah yang diterapkan di universitas pasti berbeda antara universitas satu dan lain-nya. Penerapan yang tepat dari kebijakan yang tidak tepat ataupun penerapan yang tidak tepat dari kebijakan yang tepat tidak akan memberikan hasil optimal bagi perusahaan (Syamsuddin, 2009). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 55 Tahun 2013 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa uang kuliah merupakan keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi dan dibebankan kepada mahasiswa sesuai kemampuan ekonominya (Rambing, et al., 2017).

Pembayaran uang kuliah merupakan suatu tempat untuk memperoleh informasi dalam upaya peningkatan intelektual dari sumber daya manusia untuk menuju terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Pada era informasi seperti sekarang ini ditandai dengan kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem pembayaran uang kuliah memiliki andil yang sangat penting diberbagai bidang dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Uang kuliah sering didefenisikan sebagai gedung atau ruang didalamnya terdapat sekumpulan koleksi dan pembayaran uang kuliah pada bagian administrasi, oleh karena itu banyak hal yang harus menjadi perhatian khususnya bagi penyelenggara pembayaran uang kuliah agar bagian Administrasi benar-benar mendapatkan kepuasan dari Uang kuliah (Rimar, 2019).

Penerapan sistem informasi, perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan akan dapat digunakan untuk menjadi kekuatan bersaing bagi perguruan tinggi untuk dapat bertahan serta unggul dalam bidang pemanfaatan teknologi. Kemajuan teknologi informasi menghasilkan beberapa produk yang canggih, termasuk di

dalamnya teknologi informasi dan komputer. Dengan penerapan sistem komputer dalam melaksanakan suatu pekerjaan, maka akan dapat menghasilkan suatu pengolahan data secara cepat dan akurat. Penerapan program aplikasi terhadap sistem manual menjadi sistem komputer akan terjadi perubahan pola teknologi suatu system (Magdalena, *et al.*, 2018).

Sistem informasi pembayaran biaya kuliah mahasiswa adalah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan pekerjaan bagian keuangan universitas, terkait data pembayaran biaya kuliah mahasiswa (Deby, 2020). Universitas Kristen Indonesia (UKI) sebagai salah satu lembaga perguruan tinggi swasta di Jakarta merupakan lembaga pendidikan yang memiliki moto “Melayani Bukan Dilayani” yang esensinya adalah melakukan pelayanan di bidang pendidikan dengan sungguh-sungguh. Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi, Universitas Kristen Indonesia (UKI) juga memiliki strategi di dalam menghadapi persaingan. Kebijakan pembayaran uang kuliah dan tarif uang kuliah dikemas sedemikian rupa agar mampu mendapatkan mahasiswa sesuai dengan target yang ditetapkan. Universitas Kristen Indonesia pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020-2021 kurang lebih memiliki 4.498 mahasiswa aktif yang tersebar di 9 Fakultas meliputi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Fakultas Sastra, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Vokasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program Pasca Sarjana.

1.2 Permasalahan

Proses pembayaran uang kuliah di Universitas Kristen Indonesia mencakup 4 tahapan yaitu: (1) Persiapan data tagihan, (2) Proses validasi data oleh unit kerja (BAA dan Biro Keuangan), (3) Upload data ke sistem *student finance* UKI, dan (4) Penetapan masa pembayaran uang kuliah, yang mencakup dua periode yaitu pertama, masa pembayaran reguler, dan kedua masa pembayaran dengan denda.

Tahap persiapan data tagihan dilakukan oleh para staf pada Biro Keuangan yang didukung oleh informasi data mahasiswa dari tiap fakultas dan Biro Pemasaran. Staf pada Biro Keuangan menyusun besaran tarif pembayaran tagihan sesuai standar yang ditetapkan UKI. Tahap kedua setelah data tagihan disiapkan

adalah data tersebut akan divalidasi oleh pihak pimpinan diantaranya kepala Biro Keuangan, Biro Akademik, dan Warek Non-Akademik (WR 2). Validasi dilakukan untuk memeriksa apakah nama dan nomor induk mahasiswa (NIM) sudah sesuai dengan data yang ada. Begitu juga validasi besaran tagihan untuk mengetahui apakah komponen-komponen tagihan yang ditetapkan sesuai dengan nilai standar tagihan yang berlaku.

Bilamana hasil validasi data sudah selesai maka tahap selanjutnya adalah *upload* data ke sistem *student finance*. Tahap ini dilakukan oleh Biro Keuangan dan data di sistem dapat dilihat oleh Biro Keuangan sendiri, Biro Akademik, dan para Mahasiswa. Tahap keempat yaitu penetapan masa pembayaran uang kuliah akan muncul di sistem secara langsung pada saat tahap *upload* data. Saat *upload* data, sudah ditetapkan masa pembayaran yang terdiri dari dua periode yaitu periode reguler selama tiga minggu dan setelah periode ini, diikuti periode pembayaran dengan denda.

Selama masa tahap satu sampai empat, para mahasiswa lama (sudah terdaftar sebagai mahasiswa UKI) dapat melakukan Registrasi Online (RO) pada sistem *student finance*. Registrasi Online (RO) dilakukan oleh mahasiswa untuk mendaftarkan dirinya pada sistem untuk bersiap mengikuti kuliah pada semester ke depan. Pada sistem, mahasiswa akan menawarkan sejumlah mata kuliah dengan jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) tertentu. Proses registrasi mahasiswa ini harus disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang mana persetujuan juga dilakukan melalui sistem (AIS). Persetujuan oleh Dosen PA akan terkonfirmasi di sistem dan Biro Keuangan akan menyepakati informasi tersebut dengan menetapkan jumlah tagihan uang kuliah yang harus dibayarkan mahasiswa.

Untuk mahasiswa yang baru masuk ke UKI, setelah mendaftar melalui sistem online, otomatis dikenakan pembayaran uang kuliah dengan grade B oleh Biro Keuangan. Grade B memiliki arti mahasiswa diberikan keringanan pembayaran yaitu bebas atau tidak membayar uang Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP). Sedangkan pembayaran uang beban tetap (BT) dan yang lainnya wajib dibayar. Padahal mahasiswa baru memiliki peluang menerima keringanan pembayaran lainnya yaitu grade A (bebas SPP dan BT), grade C (bebas SPP 50%),

dan grade D (membayar normal/penuh atau wajib membayar semua beban pembayaran).

Dalam setiap tahapan pembayaran uang kuliah di atas, dapat muncul berbagai akibat atau risiko baik bersifat operasional maupun risiko nilai penerimaan uang bagi UKI. Risiko pada tahap pertama diantaranya seringkali Biro Keuangan berbeda informasi dengan Biro Akademik mengenai status mahasiswa aktif atau tidak. Hal ini disebabkan karena Biro Keuangan tidak menerima informasi dari oleh Biro Akademik mengenai siapa mahasiswa yang aktif atau tidak aktif. Oleh karena itu Biro Keuangan dapat saja mensetting mahasiswa yang sudah tidak aktif lagi ke dalam daftar pembayaran uang kuliah. Faktanya ada mahasiswa yang sudah tidak aktif lagi, atau cuti dan lainnya sehingga data yang ditetapkan Biro Keuangan dapat menjadi tidak valid. Akibat dari hal ini adalah penetapan data tagihan tidak valid dan mengotori pencatatan secara akuntansi. Risiko disini juga mencakup data/informasi penerimaan/saldo piutang membengkak/meningkat. Bilamana ada pemeriksaan/audit internal dan eksternal maka akan ditemukan sejumlah piutang yang tidak tertagih. Hal ini membuka peluang dugaan penyalahgunaan atau yang lainnya.

Berbagai akibat dan risiko yang dapat muncul pada tahap kedua pembayaran uang kuliah adalah tahap ini sering membutuhkan waktu lama. Berbagai alasan yang muncul mencakup adalah para pemimpin yang berkompeten sering tidak berada di tempat dan atau dinas luar. Akibat keterlambatan ini menyebabkan Biro Keuangan sering memproses *upload* data langsung ke server. Melalui data yang sudah ter-*upload* menyebabkan tercatat jumlah piutang yang mungkin membengkak dan tidak tertagih. Hal inipun akan memberikan indikasi bahwa terdapat kerugian keuangan yang berjumlah besar dan bahkan realisasi piutang menjadi nol.

Akibat dan risiko yang dapat timbul pada tahap ketiga pembayaran uang kuliah adalah penyesuaian format data. Format data dimaksudkan disini adalah Biro Keuangan yang men-*setting* di sistem *student finance* bahwa semua mahasiswa baru membayar uang kuliah dengan grade B. Melalui penetapan ini, mahasiswa baru yang berkewajiban membayar uang kuliah bukan grade B, harus melakukan

pembayaran sesuai grade B. Kemudian penyesuaian akan dilakukan secara manual oleh Biro Keuangan untuk perbaikan. Penyesuaian yang dilakukan adalah mahasiswa baru yang membayar lebih, kelebihan pembayarannya akan dimasukkan ke tagihan semester berikutnya. Jika mahasiswa membayar kurang, dikenakan tambahan tagihan pada semester berikutnya. Munculnya akibat ini termasuk risiko pada sistem *student finance* yang tidak bekerja optimal.

Untuk mahasiswa lama, risiko di tahap ketiga ini mencakup perubahan yang dilakukan oleh mahasiswa setelah Registrasi Online. Setelah ditemukan mahasiswa bahwa jumlah tagihannya tidak sesuai dengan SKS yang ditawarkan, dapat dilakukan konfirmasi kepada Biro Keuangan. Biro Keuangan kemudian memperbaharui data dan mahasiswa bersangkutan membayar tagihan sesuai besaran perubahan di RO. Bagi mahasiswa lama yang tidak aktif lagi atau sedang cuti, maka *upload* data oleh Biro Keuangan menciptakan piutang yang membengkak. Sedangkan pada sistem *student finance*, akibat yang muncul ini menunjukkan sistem yang dioperasikan belum tidak bekerja optimal/efektif.

Akibat dan risiko yang dapat muncul pada tahap keempat adalah pada periode pertama selama tiga minggu, mahasiswa yang terkendala pembayaran dapat minta keringanan penundaan waktu membayar. Untuk hal ini, mahasiswa harus membuat surat permohonan ke pimpinan fakultas untuk meminta penundaan pembayaran. Jika disetujui, barulah Dekan mengusulkan penundaan tersebut ke Warek Non-Akademik. Jika disetujui barulah Biro Keuangan membuat kwitansi pembayaran. Umumnya diharuskan mahasiswa membayar sebagian dulu dari jumlah tagihannya. Keadaan ini memunculkan risiko mengurangi penerimaan dana SPP atau menaikkan jumlah piutang. Risiko lainnya terkait operasional sistem *student finance* adalah sistem tidak mendeteksi adanya tagihan-tagihan yang belum terbayar. Hal ini mengakibatkan terjadi pembengkakan piutang.

Semua akibat dan risiko yang disebutkan di atas mengenai pembengkakan piutang, akan menambah saldo Akun Piutang Mahasiswa pada Neraca Laporan Keuangan UKI. Kondisi ini menyebabkan penerimaan UKI akan terlihat besar (*accrual*) namun pada faktanyasecara aliran kas, tidak akan bertambah sesuai nilai Piutang Mahasiswa, karena beberapa tagihan yang dibuat tidak valid. Hal ini juga

berpengaruh pada pemeriksaan (audit) oleh internal maupun eksternal yang akan menilai Laporan Keuangan UKI kurang baik.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan perumusan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi operasional pembayaran uang kuliah dengan sistem *student finance* dan permasalahan yang mengakibatkan munculnya risiko operasional dan nilai penerimaan uang kuliah di UKI?
2. Bagaimana mengukur nilai risiko operasional pembayaran uang kuliah dan risiko nilai penerimaan uang kuliah dan beban kenaikan piutang mahasiswa?
3. Bagaimana mitigasi risiko yang timbul dari proses pembayaran uang kuliah dengan sistem *student finance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi operasional pembayaran uang kuliah dengan sistem *student finance* dan kejadian tidak diinginkan yang mengakibatkan munculnya risiko operasional dan nilai penerimaan uang kuliah di UKI.
2. Mengukur nilai risiko operasional pembayaran uang kuliah dan risiko nilai penerimaan uang kuliah dan beban kenaikan piutang mahasiswa.
3. Memitigasi risiko yang timbul dari proses pembayaran uang kuliah dengan sistem *student finance*.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup proses pembayaran uang kuliah dengan menggunakan sistem *student finance* di Universitas Kristen Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan, menilai, dan mengukur mulai dari proses operasional pembayaran uang kuliah dengan sistem *student finance*, masalah dan akibat yang muncul dalam proses tersebut. Risiko yang terukur dapat mencakup risiko operasional pembayaran uang kuliah maupun risiko nilai penerimaan uang

kuliah di Universitas Kristen Indonesia. Juga, penelitian ini akan melakukan mitigasi risiko untuk menemukan solusi terbaik.

